



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAPPIWALI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **490785**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.215.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 351 m2/260 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 274 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. Tanah Seluas 941 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/280 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
6. Tanah Seluas 1480 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
7. Tanah Seluas 2150 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 127.500.000

1. MOTOR, SUZUKI UY 125 SJUTA A/AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA Y1G02N02LD A/T/SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP-RA. A/T/SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



4. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5S M/T. /MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 164.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.537.200.000

III. HUTANG Rp. 180.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.357.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.